



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUWITO NS**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**
3. NHK : **976780**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.015.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/128 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/128 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/84 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>590.000.000</b>
1. MOBIL, INNOVA G Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000		
2. MOBIL, AGYA TOYOTA G Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
3. MOBIL, BMW 5125 Tahun 2008, HADIAH Rp. 145.000.000		
4. MOTOR, HONDA BEAT BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
5. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.600.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>168.000.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>105.000.000</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.881.600.000</b>



III. HUTANG

Rp. 336.959.733

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.544.640.267

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.